



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN KURIKULUM MERDEKA MENJADI KURIKULUM NASIONAL

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana menerapkan Kurikulum Merdeka (Kurma) secara nasional pada tahun 2024, dengan target penyelesaian aturannya pada akhir Maret 2024. Keputusan ini diambil setelah melihat bahwa mayoritas satuan pendidikan di Indonesia telah mulai mengimplementasikannya. Data menunjukkan bahwa sekitar 73% dari total satuan pendidikan telah beralih ke Kurma, sementara 27% sisanya masih menggunakan Kurikulum 2013 revisi 2017.

Dengan visi yang serupa dengan pendahulunya, Kurma diharapkan dapat memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih sederhana dan memastikan kebebasan dari kepadatan materi pelajaran yang membebani siswa. Guru diberi keleluasaan untuk merancang strategi pembelajaran sendiri sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman. Namun, perjalanan implementasinya tidaklah mulus di seluruh wilayah Indonesia.

Analisis awal yang dilakukan oleh Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap kesiapan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Kurma pada Februari dan Maret 2024 menyoroti beberapa tantangan yang harus diatasi. *Pertama*, masalah kuantitas dan kualitas guru masih menjadi kekhawatiran utama, di mana pemerintah masih berjuang untuk menangani kekurangan jumlah dan kualitas guru yang memadai. Selain itu, belum semua guru telah memperbarui pendekatan pembelajaran mereka sesuai dengan paradigma Kurma, yang menjadi kendala dalam menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan konsep Kurma. *Kedua*, ketidakmerataan dalam ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung pembelajaran di berbagai daerah dapat menghambat proses implementasi Kurma secara efektif. Sarpras yang sering dikeluhkan adalah sambungan internet dan alat bantu ajar. Kondisi ini tidak hanya terjadi di daerah perdesaan, namun juga dialami para guru di kota. *Ketiga*, dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah masih terbatas, baik dari segi anggaran maupun bimbingan teknis. Upaya memahami Kurma dibebankan secara berlebihan kepada guru, dengan berbagai kewajiban administrasi melalui pembelajaran daring yang menyita waktu dan menambah beban kerja guru.

Selain itu, pergeseran struktur kurikulum juga menyebabkan beberapa guru kekurangan mata pelajaran, sementara guru lain bertambah. Hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa Kurma cenderung mendorong guru berlomba-lomba mengakses sistem pembelajaran digital yang disiapkan Kemendikbudristek, sehingga lupa pada pengembangan kompetensi pedagogi yang seharusnya selalu ditingkatkan. Kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi perlu memastikan bahwa para guru memiliki kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Didorongnya sekolah untuk mengimplementasikan Kurma seolah menafikan pekerjaan rumah Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru yang masih belum memenuhi harapan.

Pemerintah daerah juga mengakui minimnya dukungan dana dan pelatihan bagi guru telah menimbulkan lubang yang besar dalam implementasi Kurma. Hal ini terjadi terutama bagi sekolah yang bukan sekolah penggerak dan guru-gurunya tidak dilatih dalam program guru penggerak. Beban pengawasan implementasi Kurma juga jatuh pada pengawas sekolah yang jumlahnya semakin minim. Meskipun data menunjukkan bahwa hampir $\frac{3}{4}$ satuan pendidikan telah mengimplementasikan Kurma, tetapi kualitas pelaksanaannya masih bervariasi. Bahkan, banyak sekolah yang hanya melaporkan bahwa mereka telah menerapkan Kurma, padahal pada kenyataannya, hal tersebut hanya sebatas formalitas.

Mengetahui kompleksitas tantangan yang dihadapi, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Kurma. Kemendikbudristek memang tidak akan memaksa sekolah untuk menerapkan Kurma secara penuh pada tahun pelajaran 2024/2025. Sekolah yang belum siap untuk beralih ke Kurma akan diberikan kesempatan untuk berproses selama dua hingga tiga tahun ke depan. Namun, janji ini perlu diterjemahkan menjadi intervensi konkret yang mampu menutup kesenjangan antara harapan pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengembangan yang lebih efektif bagi para guru dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan. Selain itu, Kemendikbudristek juga harus melibatkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam menyiapkan calon guru berkualitas yang mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Kurma) setelah mereka lulus. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong kerja sama antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah, yang merupakan hal penting dalam mengatasi hambatan implementasi Kurma. Saat ini, Kurma cenderung diterapkan dari atas ke bawah, kurang memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan di daerah. Oleh karena itu, dukungan anggaran dari Komisi X DPR RI sangat diperlukan untuk memperkuat sosialisasi dan pelatihan yang sesuai, yang menjadi kunci utama keberhasilan transformasi kurikulum ini.

Sumber

Kompas, 19 Maret 2024;
kompas.id, 13 Maret 2024; dan
Raker Komisi X, 6 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.